



JOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 4183-4190

ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Wilayah Medan

Nirwansyah Sukartara^{1✉}, M. Rifqi Romadhona²

Universitas Satya Terra Bhinneka

Email: nirwansukar@satyaterrabhinneka.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance Pemerintah Kota Medan dalam upaya menangani banjir. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literature review. Hasil penelitian yaitu Model collaborative governance yang dapat digunakan yakni Kondisi awal, Desain kelembagaan, Kepemimpinan, Proses kolaborasi, Hasil antara. Dimana masing-masing variabel tersebut dapat diperkecil lagi menjadi sub-sub variabel. Kondisi awal dibagi menjadi 3 sub variabel, yakni ketidakseimbangan sumberdaya, insentif berkolaborasi serta pengalaman kerjasama dan konflik masa lalu. Dalam proses kolaborasi pemerintah kota Medan dapat melakukan tahapan Face to face dialogue, Trust building, Commitment to process, Shared Understanding, dan Intermediate outcomes.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Penanggulangan, Banjir*

Abstract

This research aims to analyze the collaborative governance process implemented by the Medan City Government in its efforts to deal with floods. The research method used in this research is a qualitative method with a literature review study approach. Literature studies include limiting the scope of review, determining inclusion criteria, finding literature, assessing suitability to research questions, and synthesizing research findings. The research results show that the collaborative governance model that can be used is initial conditions, institutional design, leadership, collaboration process, intermediate results. Where each of these variables can be reduced again into sub-variables. The initial condition variable is divided into 3 sub-variables, namely resource imbalance, collaboration incentives and past experiences of cooperation and conflict. In the collaboration process, the Medan city government can carry out the stages of Face to Face dialogue, Trust building, Commitment to process, Shared Understanding, and Intermediate outcomes.

Keywords: *Collaborative Governance, Mitigation, Flood*

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa yang mempengaruhi lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat, diakibatkan oleh manusia, alam, maupun non alam, yang mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa, dan lain-lain. dan kerusakan lingkungan dan kerusakan psikologis (Agnès, 2017). Kerusakan akibat banjir adalah suatu keadaan dimana air membanjiri suatu daerah dari daerah dataran rendah dikarenakan curah hujan tinggi serta kurangnya respon sistem drainase yang baik (Khambali, 2017).

Banjir merupakan masalah besar dan tergolong gangguan yang mempengaruhi aktivitas manusia. Letak Indonesia pada jalur Lingkar Pasifik dan memiliki karakteristik alam seperti geografi, topografi, dan geologi menyebabkan rentan terhadap bencana seperti banjir (Hasna & Darumurti, 2023).

Berdasarkan data BNPB tahun 2021 menunjukkan bahwa banjir bencana terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 1.288 kasus (Dihni, 2021). Tahun 2022 bencana banjir menjadi bencana terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 747 kejadian setara dengan 38,78% (Annur, 2022). Banjir umumnya terjadi di kota-kota besar salah satunya kota Medan-Sumatera Utara. Permasalahan ini disebabkan kondisi geografis Kota Medan yang banyak mengalir sungai besar dan kecil serta beberapa anak sungai lainnya. Banjir di Kota Medan setidaknya telah menggenangi tujuh dari 21 kecamatan. Ketujuh kecamatan. Penyebab banjir di Kota Medan yakni, 1) hujan deras; (2) Jumlah penduduk. (3) Pembangunan perkotaan yang tidak terkendali,

(4) drainase yang tidak memadai, infrastruktur drainase yang kurang, dan kurangnya pemeliharaan; (5) Fungsi saluran tidak jelas (Kompas.com).

Upaya untuk mengurangi risiko bencana telah dilakukan melalui pembangunan fisik dan penyadaran serta peningkatan kemampuan masyarakat di daerah rawan bencana dalam mengelola ancaman bencana (UU RI 2007). Penanggulangan bencana dilaksanakan melalui program pembangunan drainase yang dilaksanakan oleh Dinas Binamarga Kota Medan, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan kondisi drainase di Kota Medan saat ini, terdapat 90 titik rawan banjir, dan total luas kawasan rawan banjir di Kota Medan adalah 1.782 hektar. Jaringan drainase Kota Medan yang ada saat ini terdiri dari 600 km saluran primer, 1.700 km saluran sekunder, dan 800 km saluran tersier (Pasaribu, 2021).

Penanggulangan banjir di Kota Medan juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan yang terpisah dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Namun permasalahan masih tetap ada karena penyesuaian tidak dialokasikan dengan tepat. Hal ini terjadi pada fase tanggap dan pemulihan pascabencana, terutama pada saat kegiatan pascabencana. Berangkat dari permasalahan diatas Pemerintah Kota Medan dapat mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk bekerjasama dalam upaya pencegahan bencana banjir di kota Medan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian tinjauan pustaka. Pembatasan ruang lingkup tinjauan yaitu pada pemerintahan permasalahan collaborative governance pada Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara, khususnya topik penanganan banjir. Penelitian ini mengumpulkan literatur dari database berikut: Google Scholar, ResearchGate, DOAJ, SpringerLink, dan ScienceDirect. Basis data ini menyediakan literatur akademis yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir sering mengalami curah hujan yang tinggi dan berujung pada banjir. Tanah Kota Medan yang daya serapnya rendah menjadi penyebab banjir serta luas lahan kosong seperti sawah di sepanjang daerah aliran sungai juga bertambah. Ketika tanah menjadi kering dan turun hujan terus-menerus, maka daya serap tanah menurun, dan limpasan air melebihi daya serapnya sehingga menyebabkan sungai tidak mampu mengalirkan air dan menyebabkan banjir yang berasal dari faktor alam.

Penyebab banjir lainnya ialah proyek drainase yang sudah lama dilaksanakan oleh salah satu Pemerintah Kota Medan, namun masih dalam tahap mengumpulkan data dan melakukan perbaikan internal untuk membuat rencana induk. Medan memiliki dua drainase alami utama dan satu drainase buatan. Terdapat kanal alam lain seperti Sungai Bandera, Sungai Sikanbin, sungai Putih, Sungai Babra dan Sungai Seran Sari yang tidak berjalan dengan baik (Kompas.com).

Sebanyak 4.444 jalan di Kota Medan selalu tergenang air jika hujan turun, meski hujan berlangsung lama. Berdasarkan pantauan setidaknya enam belas jalan utama di Kota Medan selalu tergenang air hingga mengakibatkan banjir. Saat hujan semakin deras dan berlangsung lebih lama, genangan air sering kali semakin tinggi dan membanjiri rumah masyarakat.

BNPB dan BPBD kota Medan melaksanakan mitigasi bencana di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Kedua lembaga tersebut telah menyusun program mitigasi. Namun hal ini memerlukan koordinasi khusus dengan pemangku kepentingan pada tahap penanggulangan bencana. BPBD Kota Medan kesulitan dalam mencegah banjir karena kurangnya koordinasi dengan instansi dan lembaga lain. Selain itu, permasalahan kekurangan staf juga menyulitkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya kerjasama yang menyangkut pengelolaan hubungan regulasi dan kelembagaan. Ketika pihak swasta ikut dalam melaksanakan peran publik, maka kerjasama publik dan swasta terjadi ketika agen menjalankan fungsi aktif yang berbentuk kolaborasi (Bevir, 2009). Collaborative Governance adalah paradigma baru untuk memahami kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam urusan publik. Kolaborasi ini penting dilakukan karena masing-masing aktor mempunyai peran tertentu (Silvia, 2011).

Tata kelola kolaboratif menekankan enam kriteria. (1) forum diprakarsai oleh badan atau lembaga publik; (2) peserta forum mencakup aktor swasta; dan (3) peserta tidak hanya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat langsung dalam pengambilan

keputusan. (4) sebagai penyedia layanan bagi badan publik, (4) terorganisir, (5) forum bertujuan untuk pengambilan keputusan secara konsensus, dan (6) fokus kerja sama adalah pada kebijakan dan administrasi publik (Ansell & Gash, 2007).

Menurut Margerum (2011), tata kelola kolaboratif adalah cara penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh sekelompok pemegang kekuasaan untuk mencapai kesepakatan serta mengubah kesepakatan menjadi hasil. Di sisi lain, collaborative governance merupakan upaya pengelolaan suatu kebijakan publik dimana lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau proses dan struktur sektor publik, swasta, dan sipil terlibat di dalamnya (Emerson dan Nabatchi, 2015).

Di sisi lain, McGuire (2006) berpendapat bahwa Collaborative Governance adalah suatu proses fasilitasi dan implementasi yang dilakukan lembaga, pemerintah, masyarakat, dan LSM, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan dalam manajemen yang tidak dapat ditangani oleh pihak pemerintah saja. Bryson dan Crosby (2006) mendefinisikan Collaborative Governance sebagai pertukaran informasi, sumber daya, aktivitas yang dapat dicapai bila dilakukan hanya oleh organisasi dalam satu sektor mencapai hasil yang mustahil.

Fokus tata kelola kolaboratif adalah pada kebijakan publik dan permasalahannya. Institusi publik sangat mementingkan pencapaian tingkat konsensus di antara para pemangku kepentingan ketika menetapkan kebijakan, tujuan, dan proses kolaboratif. Tata kelola kolaboratif memerlukan terwujudnya keadilan sosial yang memenuhi kepentingan masyarakat. Ansel dan Gash (2008) dalam jurnal "Collaborative Governance in Theory and Practice" mengembangkan model Collaborative Governance dengan menggunakan empat model, yaitu.

1. Kondisi awal

Pada fase kondisi ini hubungan tiap tiap pihak dengan pola pandang yang berbeda akan menimbulkan semacam hubungan asimetris.

2. Desain kelembagaan

Berikut beberapa komponen desain tambahan :

- a. Kemampuan untuk mencapai keandalan teknis.
- b. Kolaborasi memungkinkan pengambilan keputusan yang dapat diandalkan dan meyakinkan bagi semua pihak.

3. Kepemimpinan

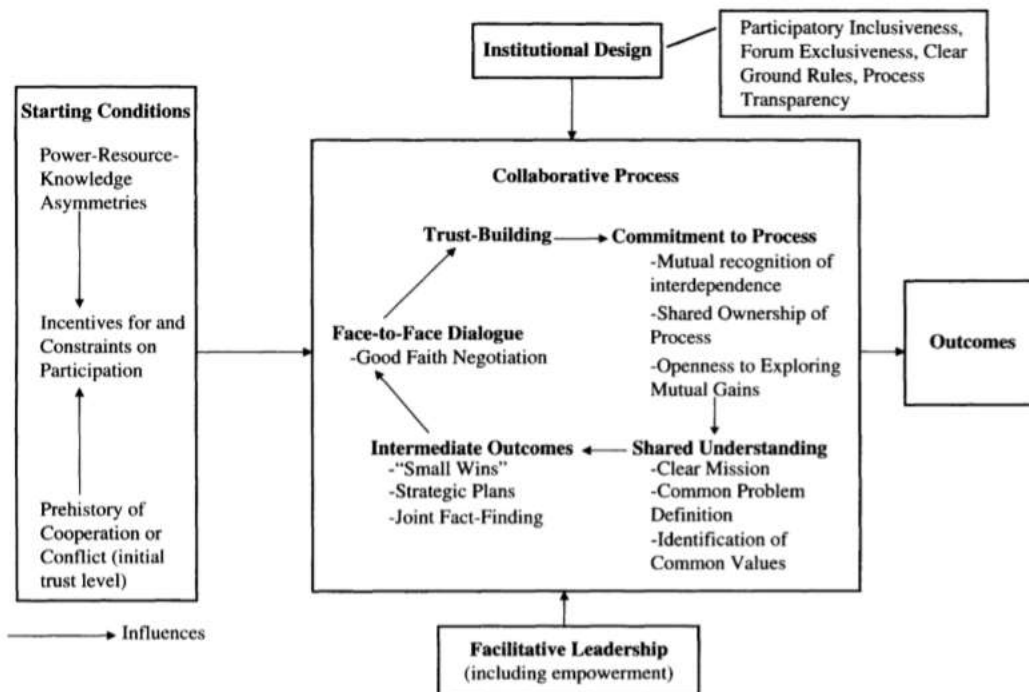
Kepemimpinan yang signifikan didasarkan pada aturan dasar, dimana legitimasi prosedural adalah hal yang terpenting dalam proses kerjasama. Penting untuk ditekankan bahwa ketika bekerja sama pemerintah harus menerapkan transparansi didalamnya.

4. Proses kolaborasi

Hal ini meliputi rumusan masalah (mengidentifikasi masalah), menetapkan arah (menentukan tujuan), dan implementasi. Tahapan dalam menjalin hubungan kerja adalah:

- a. Dialog tatap muka (Face to face)
- b. Membangun kepercayaan (Trust Building)
- c. Komitmen terhadap proses (Commitment to process)
- d. Share Understanding
- e. Hasil Sementara

Menurut Ansell & Gash (2008), Collaborative Governance adalah proses pengambilan keputusan bersama antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik serta mengelola aset publik. Selain itu, model tata kelola kolaboratif terdiri atas empat variabel utama seperti terlihat pada gambar berikut :



Variabel pertama, kondisi awal proses kolaborasi, ditentukan sumber daya kekuasaan, asimetri pengetahuan, atau kesenjangan kekuasaan dan sumber daya antara aktor-aktor yang terlibat berkolaborasi. Kedua, sejarah kerjasama atau konflik (initial trust level), yaitu sejarah konflik

antar aktor di masa lalu. Ketidakseimbangan sumber daya mempengaruhi adanya insentif dan hambatan terhadap partisipasi. Untuk itu diperlukan upaya dari pihak pemimpin kolaborasi untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Variabel kedua, desain kelembagaan, mengacu pada peraturan dalam kolaborasi dan legitimasi prosedur dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Variabel ini terdiri dari pihak yang akan berkolaborasi. Setelah forum kolaboratif terbentuk, terdapat aturan yang melegitimasi serta menciptakan kepercayaan antar pihak.

Variabel ketiga, kepemimpinan suportif, penting dalam mengajak pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam semangat kooperatif. Praktik kolaborasi terjadi dalam beberapa tahap. Ansell & Grash (2008) membagi tahapan proses kolaborasi menjadi:

a. Face to face dialogue

Proses ini terjadi melalui dialog pribadi yang dilakukan secara langsung dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dialog pribadi sangat penting untuk mengidentifikasi peluang dan manfaat kelompok.

b. Trust building

Yaitu proses membangun rasa saling percaya antar pihak, bukan sekedar tujuan negosiasi. Kepercayaan harus dibangun di awal proses.

c. Commitment to process

Proses komitmen yang mewakili keinginan peserta untuk berpartisipasi dalam collaborative governance. Menghindari risiko yang terkait dengan proses kolaborasi memerlukan komitmen serius dari semua pihak yang terlibat.

d. Shared Understanding

Pada proses ini para pihak harus mempunyai pemahaman yang sama tentang bagaimana mencapai tujuan dari proses tersebut. Artinya, semua actor sepakat mengenai dengan tujuan bersama.

e. Intermediate outcomes

Pada proses ini terdapat outcome dan keberhasilan kecil dari kolaborasi yang merupakan hasil dari proses pencapaian tujuan dan manfaat kolaborasi.

Temuan menunjukkan bahwa collaborative governance harus dilakukan dalam proses atau tahapan Face to face dialogue, Trust building, Commitment to process, Shared Understanding, Intermediate outcomes. Jika dalam pengelolaan banjir menunjukkan sedikit

keberhasilan, pemerintah dapat merekrut aktor dan organisasi swasta untuk bergabung dalam tim collaborative governance (pemerintahan terpadu). Sekalipun dampak banjir terjadi secara sporadis, dalam hal ini pemerintah dapat menerapkan collaborative governance dalam bentuk kerja sama intra-lembaga. Namun, perlu juga mempertimbangkan karya Serra-Llobet dkk. perlu dipertimbangkan. (2016) menyimpulkan bahwa kerja sama harus mengadopsi pendekatan top-down dan bottom-up yang seimbang. Pengalaman Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa pola implementasi yang tidak seimbang menyebabkan dominasi salah satu aktor, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Faktanya, proses pengambilan keputusan harus benar-benar mencerminkan preferensi masyarakat selama dan setelah banjir (Hong & Chung, 2016).

SIMPULAN

Collaborative governance merupakan upaya pemecahan masalah dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk membangun dan mengembangkan model menjadi hasil. Model collaborative governance yang dapat digunakan yakni Kondisi awal, Desain kelembagaan, Kepemimpinan, Proses kolaborasi, Hasil antara. Dimana masing-masing variabel tersebut dapat diperkecil lagi menjadi sub-sub variabel. Untuk variabel kondisi awal dibagi menjadi 3 sub variabel, yakni ketidakseimbangan sumberdaya, insentif berkolaborasi serta pengalaman kerjasama dan konflik masa lalu. Dalam proses kolaborasi pemerintah kota Medan dapat melakukan tahapan Face to face dialogue, Trust building, Commitment to process, Shared Understanding, dan Intermediate outcomes.

Daftar Pustaka

- B. S. Turner. 2012. *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- B. A. Saebani. 2012. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- E. Komara. 2012. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafrita, I., & Murdiono, M. (2020). Upacara Adat Gawai Dalam Membentuk Nilai-Nilai Solidaritas Pada Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 151. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p151-159.2020>
- Wang, N., Jiang, D., & Pretorius, L. (2016). Conflict-resolving behaviour of project managers in international projects: A culture-based comparative study. *Technology in Society*, 47, 140–147. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2016.07.004>.